



RENCANA KERJA

T.A 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. SULSEL



B A B I P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah untuk merangkum dan mensinergikan perencanaan kinerja yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam periode waktu 1 (Satu) tahun. Dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahunan sebagai suatu gambaran tentang perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk tahun 2024. Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan 2024 ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 -2026.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Gubernur merupakan Wakil Pemerintah Pusat di daerah yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Umum dan OPD yang melaksanakan tugas Pemerintahan Umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, namun dalam pelaksanaannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga terlibat dalam melaksanakan tugas absolute dan konkuren.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Ripublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
5. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Prinsip *Good Governance* yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Prov. Sulsel No. 10 Tahun 2008 tentang RPJPD Prov. Sulsel tahun 2008-2028;
14. Peraturan Daerah Prov. Sulsel No. 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
16. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021, tanggal 29 Desember 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Memberikan pedoman bagi pencapaian tujuan jangka pendek Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhatikan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

Tujuan

Tercapainya tujuan dan sasaran program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 secara efektif dan efisien sesuai kebijakan, program dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) merupakan Bab yang memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah merupakan Bab yang memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan, Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah merupakan Bab yang memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

Bab V Penutup merupakan Bab Penutup.

B A B II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pada tahun 2021 rata-rata pencapaian diatas 74-100 % dan realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan dengan pencapaian sebesar 75-100 % sehingga jika dibanding dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan pada nilai sakip sebesar 0,95. Pada tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target capaian dengan tingkat rata-rata keberhasilan sebesar 97,20% dan badan kesatuan bangsa dan politik juga telah berhasil melakukan efisiensi dengan tingkat rata-rata keberhasilan sebesar 9,72%.

Hingga akhir tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan Rencana Strategis pada Tahun ke-4 yaitu tahun 2022. Seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat dalam table dibawah, Adapun pengukuran ke 3 sasaran strategis tersebut sebagai tolok ukur keberhasilan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat	Persentase potensi konflik yang tertangani	100
2.	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Selatan	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sulsel	71,79
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	- Nilai SAKIP OPD - Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) - Nilai Temuan Material LHP yang di selesaikan (%)	95 95 100%

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2024

Pada tahun 2024 merupakan awal periode Renstra 3 (Tiga) Tahunan Bakesbangpol 2024 - 2026 sehingga tingkat pencapaian indikator diharapkan memenuhi total pencapaian akhir periode Renstra dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini memiliki 3 indikator, 8 kegiatan, dan 51 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2024 diperkirakan dapat dicapai dengan realisasi capaian sebesar rata-rata 100%, Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut ;

- A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana disiplin pegawai, Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan

Penilaian Kinerja Pegawai, Sub kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

- E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub kegiatan Penyediaan peralatan Rumah Tangga, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
 - F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Sub Kegiatan Pengadaan Aset tak Berwujud, Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Sub Kegiatan Aset Tak Berwujud.
2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Program ini memiliki 1 indikator, 1 kegiatan, dan 5 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2024 diperkirakan dapat dicapai dengan realisasi capaian sebesar 100%

dengan tingkat capaian akhir periode renstra 100%, dalam hal ini diperkirakan bakesbangpol prov sulsel dapat memenuhi seluruh target renstra, Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut

3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dan terdiri dari beberapa sub kegiatan yang meliputi, sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

4. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.

Program ini memiliki 1 indikator, 1 kegiatan, dan 5 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2024 diperkirakan dapat dicapai dengan realisasi capaian sebesar 80% dengan tingkat capaian akhir periode renstra 80%, dalam hal ini diperkirakan bakesbangpol prov sulsel dapat memenuhi seluruh target renstra, Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut ;

- A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, yang meliputi sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran

Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
Program ini memiliki 1 indikator, 1 kegiatan, dan 5 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2024 diperkirakan dapat dicapai dengan realisasi capaian sebesar 100% dengan tingkat capaian akhir periode renstra 100%, dalam hal ini diperkirakan bakesbangpol prov sulsel dapat memenuhi seluruh target renstra, Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut ;
 - A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
6. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Program ini memiliki 1 indikator, 1 kegiatan, dan 5 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2024 diperkirakan dapat dicapai dengan realisasi capaian sebesar 100% dengan tingkat capaian akhir periode renstra 100%, dalam hal ini diperkirakan bakesbangpol prov sulsel dapat memenuhi seluruh target renstra, Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut ;

- A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dan sub kegiatan Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- 7. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik ketahanan Ekonomi Daerah.

Program ini memiliki 1 indikator, 1 kegiatan, dan 5 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2024 diperkirakan dapat dicapai dengan realisasi capaian sebesar 80% dengan tingkat capaian akhir periode renstra 95%, dalam hal ini diperkirakan bakesbangpol prov sulsel dapat memenuhi seluruh target renstra, Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut ;

- A. Kegiatan Kebijakan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dan terdiri dari sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada table T-B.3 dibawah ini:

Tabel. T-B.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/S UBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2020)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun N- 1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		KET.	
											TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2021)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
1	2				3	4	6		7		8			13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		16 = 15/6*100%		17	18
	8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
	8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
	8	01	0.00.0.00. 25.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara	60.0	874,625,959.48	0.0	0.0	20.0	274,996,630.0	168,493,630.0	15.0	88,268,130.0	75.0	52.39				
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 02	1.0 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta Gerakan Bela Negara	1,500.0	874,625,959.48	0.0	0.0	500.0	274,996,630.0	168,493,630.0	500.0	88,268,130.0	100.0	52.39				
						jumlah laporan pembinaan ideologi, karakter, dan wasbang	12.0		0.0		4.0			4.0		100.0					
						jumlah laporan forum pembauran kebangsaan (FPK)	12.0		0.0		4.0			4.0		100.0					

								jumlah laporan pemantapan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah	4.0		0.0		4.0			4.0	100.0						
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 02	1.0 1	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	18.0	301,618,076.67	0.0	0.0	6.0	94,833,630.0	92,433,630.0	6.0	39,488,130.0	100.0	42.72				
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 02	1.0 1	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	9.0	573,007,882.81	0.0	0.0	3.0	180,163,000.0	76,060,000.0	3.0	48,780,000.0	100.0	64.13				
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										40.0	10.69					
							Predikat Kinerja																
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	82.01	24,286,876,498.55	0.0	0.0	81.70	7,636,189,068.0	6,986,849,456.0	92.01	6,686,535,917.0	112.62	95.70				

8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 03	1.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik di Sulsel	6.0	24,286,876,498.55	0.0	0.0	2.0	7,636,189,068.0	6,986,849,456.0	2.0	6,686,535,917.0	100.0	95.70					
						Jumlah Peserta Pendidikan Politik Masyarakat	300.0		0.0		100.0			100.0		100.0						
						Jumlah Laporan Bantuan Keuangan Parpol	3.0		0.0		1.0			1.0		100.0						
						Jumlah Pertemuan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia	3.0		0.0		1.0			1.0		100.0						
8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 03	1.0 1	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.0	129,589,668.72	100.0	0.0	1.0	40,745,100.0	19,137,500.0	1.0	18,850,500.0	100.0	98.50				
						jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.0		0.0		1.0			1.0		100.0						

	8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 03	1.0 1	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah laporan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.0	551,625,401.41	100.0	0.0	1.0	173,440,000.0	118,499,500.0	1.0	103,619,445.0	100.0	87.44				
								jumlah laporan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6.0		0.0		1.0			1.0		100.0					
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 03	1.0 1	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.0	23,126,405,055.98	100.0	0.0	1.0	7,271,317,968.0	6,729,439,456.0	1.0	6,495,242,372.0	100.0	96.52				

[illegible]

[illegible]

	8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 04	1.0 1	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan	3.0	98,707,678.85	100.0	0.0	1.0	31,035,300.0	31,035,300.0	1.0	29,194,930.0	100.0	94.07				
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										60.0	18.96					
							Predikat Kinerja																
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas)	0.0	3,893,677,029.23	0.0	0.0	0.0	1,224,235,400.0	1,505,441,400.0	58.0	1,427,380,821.0	0.0	94.81				
								Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani	100.0		0.0		100.0			100.0		100.0					
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 05	1.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	jumlah laporan pemetaan potensi kerawanan terhadap kerukunan umat beragama dan multi etnis	12.0	3,893,677,029.23	0.0	0.0	4.0	1,224,235,400.0	1,505,441,400.0	3.0	1,427,380,821.0	75.0	94.81				
								Jumlah Peserta Dialog publik peningkatan ketahanan lembaga usaha ekonomi kab/kota	100.0		0.0		100.0			100.0		100.0					
								Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi daerah	12.0		0.0		4.0			6.0		150.0					
								Jumlah laporan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	12.0		0.0		4.0			5.0		125.0					
								Jumlah Laporan Satgas Kontra terorisme, radikalisme dan narkoba	12.0		0.0		4.0			4.0		100.0					

8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 05	1.0 1	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12.0	540,003,865.34	100.0	0.0	4.0	169,786,000.0	301,001,000.0	4.0	300,977,082.0	100.0	99.99				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 05	1.0 1	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	9.0	3,196,727,086.24	100.0	0.0	3.0	1,005,103,000.0	1,157,683,000.0	3.0	1,090,641,560.0	100.0	94.21				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 05	1.0 1	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3.0	142,064,532.14	100.0	0.0	1.0	44,667,400.0	42,078,400.0	1.0	31,465,712.0	100.0	74.78				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 05	1.0 1	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	9.0	14,881,545.51	100.0	0.0	3.0	4,679,000.0	4,679,000.0	3.0	4,296,467.0	100.0	91.82				

						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											80.0	18.04						
						Predikat Kinerja																		
	8	01	0.00.0.00.25.0000	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat	60.0	6,023,534,140.13	0.0	0.0	20.0	1,893,897,124.0	2,321,545,100.0	73.75	2,067,332,883.0	368.75	89.05						
	8	01	0.00.0.00.25.0000	8.01.06	1.0	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pemetaan Konflik Wilayah	6.0	6,023,534,140.13	0.0	0.0	2.0	1,893,897,124.0	2,321,545,100.0	2.0	2,067,332,883.0	100.0	89.05						
							Jumlah Laporan Pengawasan dan pemantauan Orang Asing NGO dan lembaga asing	12.0		0.0		4.0			4.0		100.0							
							Jumlah Laporan Koordinasi Tiga Pilar Bangdes Mantra	12.0		0.0		4.0			4.0		100.0							
							Jumlah Laporan Pemantauan dan pengendalian Trantibmas	12.0		0.0		4.0			4.0		100.0							
							Jumlah Laporan Pemantauan dan pengendalian unjuk rasa	36.0		0.0		12.0			12.0		100.0							
							Jumlah Objek yang membutuhkan pengamanan	12.0		0.0		4.0			4.0		100.0							
							Jumlah Laporan Forum Kewaspadaan Dini Daerah Prov. Sulsel	12.0		0.0		4.0			4.0		100.0							
							Jumlah peserta rapat koordinasi kewaspadaan dini daerah	300.0		0.0		100.0			137.0		137.0							
							Jumlah Laporan Antisipasi Potensi Ancaman Bangsa	36.0		0.0		12.0			12.0		100.0							
							Jumlah Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	36.0		0.0		12.0			11.0		91.67							

		8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 06	1.0 1	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	3.0	54,068,449.17	100.0	0.0	1.0	17,000,000.0	17,000,000.0	1.0	0.0	100.0						
									jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	3.0		0.0		1.0			1.0		100.0						
		8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 06	1.0 1	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	18.0	104,177,179.56	100.0	0.0	6.0	32,755,000.0	32,755,000.0	6.0	2,677,373.0	100.0	8.17					
									jumlah dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	18.0		0.0		6.0			6.0		100.0						

		8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 06	1.0 1	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	18.0	2,974,109,864.61	100.0	0.0	6.0	935,108,524.0	1,464,399,500.0	6.0	1,356,333,090.0	100.0	92.62				
									jumlah dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	18.0		0.0		6.0			6.0		100.0					
		8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 06	1.0 1	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	24.0	470,471,839.70	100.0	0.0	8.0	147,924,000.0	108,056,000.0	8.0	78,129,195.0	100.0	72.30				
									jumlah dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	24.0		0.0		8.0			8.0		100.0					

	8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 06	1.0 1	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	129.0	754,795,550.42	100.0	0.0	43.0	237,320,000.0	152,540,000.0	43.0	98,150,329.0	100.0	64.34				
							jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	150.0		0.0		50.0			50.0		100.0						
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	8.01. 06	1.0 1	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	jumlah dokumen Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	18.0	1,665,911,256.67	100.0	0.0	6.0	523,789,600.0	546,794,600.0	6.0	532,042,896.0	100.0	97.30				
							jumlah dokumen Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	18.0		0.0		6.0			6.0		100.0						
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.0	9.30					
							Predikat Kinerja																
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100.0	34,990,033,299.98	0.0	0.0	100.0	11,002,174,588.0	8,695,073,083.0	100.0	7,722,008,721.0	100.0	88.81				
							Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100.0		0.0		100.0			100.0		100.0						

[illegible]

	8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen laporan Keuangan Tepat Waktu	60.0	24,345,684,600.73	0.0	0.0	20.0	7,654,679,292.0	6,295,451,381.0	20.0	6,107,998,424.0	100.0	97.02				
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 2	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.0	23,149,895,888.85	0.0	0.0	14.0	7,278,703,868.0	6,051,900,981.0	14.0	5,877,095,721.0	100.0	97.11				
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 2	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.0	174,768,310.70	0.0	0.0	1.0	54,950,000.0	54,950,000.0	1.0	54,698,000.0	100.0	99.54				
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 2	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	jumlah laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	36.0	103,205,219.68	0.0	0.0	6.0	32,449,400.0	22,399,400.0	6.0	21,555,018.0	100.0	96.23				
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 2	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36.0	61,580,783.11	0.0	0.0	12.0	19,362,000.0	1,800,000.0	12.0	910,000.0	100.0	50.56				
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 2	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.0	174,590,202.87	0.0	0.0	2.0	54,894,000.0	44,559,000.0	2.0	34,084,000.0	100.0	76.49				
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 2	06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	36.0	2,633,451.52	0.0	0.0	1.0	828,000.0	828,000.0	1.0	818,433.0	100.0	98.84				
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 2	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulananSemest eran SKPD	jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	36.0	491,316,893.45	0.0	0.0	12.0	154,478,024.0	114,950,000.0	12.0	114,863,000.0	100.0	99.92				
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 2	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	36.0	187,693,850.55	0.0	0.0	1.0	59,014,000.0	4,064,000.0	1.0	3,974,252.0	100.0	97.79				
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.0	11.20					
						Predikat Kinerja																
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah persentase administrasi barang milik daerah yang terdata dengan baik	60.0	132,281,641.40	0.0	0.0	20.0	41,591,500.0	33,873,366.0	20.0	26,020,252.0	100.0	76.82				
	8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 3	01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.0	57,636,966.82	0.0	0.0	1.0	18,122,000.0	9,188,000.0	1.0	1,615,236.0	100.0	17.58				

8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 3	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.0	74,644,674.58	0.0	0.0	1.0	23,469,500.0	24,685,366.0	1.0	24,405,016.0	100.0	98.86				
						<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>											66.67	19.41				
						<i>Predikat Kinerja</i>																
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Prilaku Pegawai Prangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja	60.0	1,517,778,668.92	0.0	0.0	20.0	490,438,024.0	268,607,000.0	20.0	197,569,246.0	100.0	73.55				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah baju	174.0	324,140,352.77	0.0	0.0	58.0	101,915,000.0	48,565,000.0	58.0	48,565,000.0	100.0	100.0				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 5	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen	36.0	151,266,066.21	0.0	0.0	12.0	47,560,512.0	39,570,000.0	9.0	39,280,526.0	75.0	99.27				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 5	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah dokumen	36.0	138,232,389.46	0.0	0.0	12.0	43,462,512.0	35,472,000.0	12.0	35,203,720.0	100.0	99.24				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.0	146,302,862.46	0.0	0.0	1.0	46,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 5	10	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	jumlah orang yang mengikut sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	300.0	686,275,815.29	0.0	0.0	100.0	229,000,000.0	145,000,000.0	100.0	74,520,000.0	100.0	51.39				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	30.0	71,561,182.73	0.0	0.0	10.0	22,500,000.0	0.0	2.0	0.0	20.0					
						<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>											35.91	5.30				
						<i>Predikat Kinerja</i>																
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan Administrasi Umum Kantor	60.0	4,632,106,544.48	0.0	0.0	20.0	1,463,021,512.0	1,067,483,500.0	20.0	644,502,940.0	100.0	60.38				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	3.0	27,384,079.26	0.0	0.0	1.0	8,610,000.0	8,610,000.0	1.0	8,570,000.0	100.0	99.54				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan	9.0	150,316,649.69	0.0	0.0	3.0	47,262,000.0	47,262,000.0	3.0	46,634,999.0	100.0	98.67				

8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.0	301,562,004.50	0.0	0.0	2.0	94,816,000.0	77,800,000.0	2.0	62,060,000.0	100.0	79.77				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 6	07	Penyediaan BahanMaterial	jumlah jenis bahan material	30.0	242,544,701.98	0.0	0.0	10.0	76,260,000.0	64,860,000.0	10.0	57,480,000.0	100.0	88.62				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah jenis Fasilitas Kunjungan Tamu	3.0	786,175,924.16	0.0	0.0	1.0	247,186,500.0	197,332,500.0	1.0	179,607,500.0	100.0	91.02				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.0	2,622,204,142.83	0.0	0.0	32.0	831,075,500.0	533,818,000.0	32.0	187,581,515.0	100.0	35.14				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0.0	60,178,183.93	0.0	0.0	100.0	18,921,000.0	6,901,000.0	100.0	6,768,926.0	100.0	98.09				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36.0	441,740,858.13	0.0	0.0	12.0	138,890,512.0	130,900,000.0	12.0	95,800,000.0	100.0	73.19				
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											72.73	7.55				
						Predikat Kinerja																
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.0	714,963,960.01	0.0	0.0	20.0	224,796,300.0	105,594,900.0	20.0	105,502,900.0	100.0	99.91				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 7	05	Pengadaan Mebel	jumlah Pengadaan Mebel	15.0	76,331,928.24	0.0	0.0	2.0	24,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.0	638,632,031.77	0.0	0.0	29.0	200,796,300.0	105,594,900.0	29.0	105,502,900.0	100.0	99.91				
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											20.0	9.99				
						Predikat Kinerja																
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.0	562,348,561.58	0.0	0.0	20.0	176,811,536.0	183,671,536.0	20.0	141,091,936.0	100.0	76.82				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3.0	57,248,946.18	0.0	0.0	3.0	18,000,000.0	18,000,000.0	3.0	11,124,400.0	100.0	61.80				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.0	142,613,485.93	0.0	0.0	20.0	44,840,000.0	51,700,000.0	20.0	15,996,000.0	100.0	30.94				

8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.0	362,486,129.47	0.0	0.0	12.0	113,971,536.0	113,971,536.0	12.0	113,971,536.0	100.0	100.0				
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											75.0	16.06				
						Predikat Kinerja																
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	60.0	1,578,320,302.52	0.0	0.0	20.0	476,414,000.0	473,874,000.0	18.0	337,371,108.0	90.0	71.19				
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.0	1,400,258,335.61	0.0	0.0	6.0	440,264,000.0	436,224,000.0	6.0	305,371,108.0	100.0	70.0				
							jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.0		0.0		17.0			17.0		100.0					
8	01	0.00.0.00. 25.0000	X.XX. 01	1.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.0	114,974,966.91	0.0	0.0	10.0	36,150,000.0	37,650,000.0	10.0	32,000,000.0	100.0	84.99				
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											42.86	12.92				
						Predikat Kinerja																

2.2 Sasaran meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat

2.2.1. Analisis capaian Kinerja Analisa Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN
Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat	Persentase potensi konflik yang tertangani	100	100 %	100%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Untuk tahun 2022 target pada sasaran ini sebesar 100 Jumlah Persentase Potensi konflik yang tertangani sampai dengan akhir 2022 badan kesatuan bangsa dan politik berhasil mencapai realisasi capaian kinerja sebesar 100% Potensi konflik yang tertangani dengan persentase capaian target 100% hasil ini didapat dari Realisasi 2022 dibagi Target capaian kinerja target dinyatakan bagus karena persentase potensi konflik yang tertangani semua dapat ditangani dengan baik. Hal ini bisa kami capai berkat koordinasi dan sinergi yang baik antara anggota Forkopimda, ini terbukti dengan keberhasilan Badan kesatuan bangsa dan politik menyelenggarakan 27 kali rapat.

2.2.2 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indicator kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi 2022	Tingkat pencapaian
Persentase potensi konflik yang tertangani	persentase		100 %	

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Berdasarkan Arahkan dari tim Kemenpan RB untuk merubah indicator pada Rencana Kerja (RENJA) sehingga pada analisis ini tidak dapat di analisis karena ada perbedaan indicator anatara RENSTRA dan Kinerja yang dicapai.

2.2.3 Analisis Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Standar nasional	Capaian
1.	Meningkatnya keamanan dan ketentaraman Masyarakat	Persentase potensi konflik yang tertangani	persentase	100%		-

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas Realisasi kinerja sasaran ini belum bisa dibandingkan dengan standar nasional, hal ini disebabkan untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik belum ada standar nasional maupun SPM, sehingga belum dapat dibandingkan.

2.2.4 Analisa Faktor Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi

factor pendukung yang menyebabkan keberhasilan sebagai berikut:

- terciptanya koordinasi yang baik dengan semua stakeholder antara lain TNI,POLRI, dan Badan Intelijen Daerah.
- Dukungan dari pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Badan Kesbangpol Kab/Kota.
- Melaksanakan rapat forkopimda dan kominda
- Melaksanakan sosialisasi terkait wawasan kebangsaan kepada masyarakat
- Melaksanakan pertemuan dengan para fkub dan ormas di Sulawesi selatan.

2.2.5 Analisis Capaian Kinerja atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

No	Sasaran	% Capaian kinerja	%Penyerapan anggaran	%Tingkat efisiensi
1.	meningkatnya keamanan dan ketentaraman masyarakat	100 %	99,89%	0,11%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Keterangan :

Jika %capaian Kinerja<100% maka % capaian kinerja-%penyerapan anggaran.

Jika% capaian kinerja>= 100% maka 100% - %penyerapan anggaran.

Berdasarkan table diatas Badan kesatuan bangsa dan politik mendapatkan penyerapan anggaran sebesar 99,89% dengan capaian kinerja sebesar 100 % sehingga tingkat efisiensi pada Bakesbangpol mendapatkan persentase sebesar 0,11%.

2.2.6 Analisa Program/ Kegiatan dalam pencapaian kinerja

No.	Program	Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	% keuangan	Capaian kinerja
1.	program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 2,895,430,700	Rp. 2,863,844,605	98,91	100 %
2.	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 319,070,600	Rp. 313,603,238	98,29	100 %
3.	program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi,	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 709,408,800	Rp. 705,823,590	99,49	100 %

	sosial, dan budaya					
4.	program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. 46,503,703,104	Rp. 45,899,532,512	89,05	95,20%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan tabel diatas ada 4 program dan 4 kegiatan penunjang yang meningkatkan sasaran strategis meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% Dalam mencapai target pada sasaran ini, semua program yang ada secara bersama-sama menunjang tercapainya target yang telah ditentukan. Adapun program yang paling berperan dalam pencapaian target sasaran ini adalah program peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, program pemeliharaan ketenteraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Secara keseluruhan pencapaian sasaran meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat dapat tercapai dengan baik pada tahun 2022 ini. Semua potensi konflik yang ada pada tahun 2022 dapat ditangani dengan baik melalui koordinasi dengan stakeholder terkait terutama Badan Intelijen Daerah, TNI, dan POLRI dan Masyarakat di Sulawesi Selatan.

2.2.7 Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indicator	satuan	Target	Realisasi 2021	Realisasi 2022
Persentase potensi konflik yang tertangani	persentase	100		100

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Untuk analisis ini capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak dapat dibandingkan karena adanya perubahan indicator dari jumlah konflik sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik (2021) menjadi persentase potensi konflik yang tertangani (2022).

2.3 Sasaran strategis meningkatnya indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan

2.3.1 Analisis capaian Kinerja Analisa Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indicator kinerja	Target	Realisasi	% capaian
Nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan	71,79	74,85	104,2

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan table diatas tahun 2022 badan kesatuan bangsa dan politik menargetkan nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan sebesar 71,79 akan tetapi sampai dengan akhir 2022 indeks demokrasi indonesia di sulawesi selatan berdasarkan data BPS tercatat sebesar 74,85 yang artinya target tersebut tercapai sebesar 104,2, hal ini bisa tercapai berkat peran semua stecholder dan hasil dari badan kesatuan bangsa dan politik provinsi sulawesi selatan dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat yang sepanjang tahun 2022 dilakukan sebanyak 27 kali.

2.3.2 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indicator kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi 2022	Tingkat pencapaian
Nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan	Angka	71,79	74,85	104,2

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan table diatas akhir rpjmd/renstra badan kesatuan bangsa dan politik menargetkan nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan sebesar 71,79 akan tetapi sampai dengan akhir 2022 indeks demokrasi indonesia di sulawesi selatan berdasarkan data BPS tercatat sebesar 74,85 dengan ini bahwa sulsel sudah melewati target yang di tentukan yang artinya target tersebut tercapai sebesar 104,2 %.

2.3.3 Analisis Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Indicator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Standar Nasional	Capaian
1.	meningkatnya nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan	Nilai indeks demokrasi di Sulawesi selatan	Angka	74,85	78,12	104,2%

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan tabel diatas Nilai IDI di Sulawesi selatan sebesar 74,85 dibandingkan dengan IDI (Nasional) sebesar 78.12, IDI Sulawesi selatan mendapatkan capaian sebesar 104,2% itu artinya cukup baik karena di atas 90%.

2.3.4 Analisa Faktor Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi

Factor pendukung yang menyebabkan keberhasilan sebagai berikut:

- Terciptanya koordinasi yang baik dengan semua stakeholder terkait dengan demokrasi antara lain LSM, Partai Politik, Media Cetak, Media Elektornik.
- Dukungan dari pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Badan Kesbangpol Kab/Kota.
- Tersaluranya bantuan keuangan parpol sehingga dapat membuat kegiatan Pendidikan politik dan pembinaan kepada masyarakat.
- Melaksanakan rapat koordinasi terkait Pendidikan politik.

2.3.5 Analisis Capaian Kinerja atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

	Sasaran	% Capaian kinerja	%Penyerapan anggaran	%Tingkat efisiensi
1.	meningkatnya nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan.	104,2%	97,19%	2,81 %

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Keterangan :

Jika %capaian Kinerja<100% maka % capaian kinerja-%penyerapan anggaran

Jika% capaian kinerja>= 100% maka 100% - %penyerapan anggaran.

Berdasarkan table diatas Badan kesatuan bangsa dan politik mendapatkan penyerapan anggaran sebesar 97,19 dengan capaian kinerja sebesar 104,2% sehingga tingkat efisiensi pada Bakesbangpol mendapatkan persentase sebesar 2,81%.

2.3.6 Analisa Program/ Kegiatan dalam pencapaian kinerja

3	Program	Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	% keuangan	Capaian kinerja
1.	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Rp. 5,931,450,552	Rp. 5,764,649,266	97,19%	104,2 %

		Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
--	--	---	--	--	--	--

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Sesuai pada tabel di atas untuk mendukung sasaran pada Indeks Demokrasi Indonesia terdapat 1 program dan 1 Kegiatan yang menunjang untuk terjadinya peningkatan IDI sesuai realisasi keuangan sebesar Rp. 5,764,649,266 atau 97,19%, dengan tingkat capaian kinerja 104,2% sehingga program tersebut berjalan sesuai dengan sasaran yang diinginkan untuk mencapai target.

2.3.7 Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indicator	Satuan	Target	Realisasi 2021	Realisasi 2022
Nilai indeks demokrasi di Sulawesi selatan	Angka	71.79	67,61	74,85

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir badan kesatuan bangsa dan politik menunjukkan bahwa target di atas sebesar 71,79 dengan realisasi 2021 sebesar 67,61 dan realisasi 2022 sebesar 74,85 tabel ini menunjukkan terdapat peningkatan nilai IDI dari tahun sebelumnya bahkan terlihat perbedaan yang sangat mencolok antara tahun 2022 dan 2021 ini disebabkan karena terjadi perubahan indikator yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel.

2.4 Sasaran strategisMeningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.

2.4.1 Analisis capaian Kinerja Analisa Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indicator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai SAKIP OPD	95	75,00	78,95 %
Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	100 %	100 %	100%
Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik	100 %	100 %	100%
Temuan material LHP yang terselesaikan	100 %	100%	100%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas pada tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menargetkan mendapat poin 95 untuk Nilai sakip Opd akan tetapi sampai dengan akhir 2022 hasil evaluasi inspektorat provinsi Sulawesi selatan terhadap Sakip Bakesbangpol tahun 2022 mendapat poin 75,00 ini artinya badan kesatuan bangsa politik berhasil mencapai target sebesar 78,95%.

Sedangkan untuk indikator ke 2 yaitu Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) ditargetkan tercapai sebesar 100% dan sampai dengan akhir 2022 seluruh capaian kinerja berhasil terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100%.

Sedangkan untuk indikator ke 3 yaitu Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik pada badan kesatuan bangsa dan politik yang di targetkan sebesar 100% dan sampai akhir 2022 Asn Berkategori Baik sebesar 100% yang artinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhasil mencapai target sebesar 100%, Indikator ke 4 yaitu temuan material LHP pada badan kesatuan bangsa dan politik di targetkan sebesar 100% dan sampai akhir 2022 memperoleh target sebesar 100%.

2.4.2 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indicator kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi 2022	Tingkat pencapaian
Nilai SAKIP OPD	Nilai	100	75,00	75,00
Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan	Persentase	100%	100 %	100 %

Persentase ASN Nilai SKP Kategori terbaik	Persentase	100%	100%	100% ¹
Temuan material LHP yang Terselesaikan	persentase	100%	100%	100%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas akhir rpjmd/renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menargetkan mendapat poin 100 untuk Nilai sakip Opd akan tetapi sampai dengan akhir 2022 hasil evaluasi inspektorat provinsi Sulawesi selatan terhadap Sakip Bakesbangpol tahun 2022 mendapat poin 75,00 ini artinya badan kesatuan bangsa politik berhasil mencapai target sebesar 75,00%.

Sedangkan untuk indikator ke 2 yaitu Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) ditargetkan akhir Rpjmd/Renstra tercapai sebesar 100% dan sampai dengan akhir 2022 seluruh capaian kinerja berhasil terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100%.

Sedangkan untuk indikator ke 3 yaitu Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik pada badan kesatuan bangsa dan politik yang di targetkan akhir Rpjmd/Renstra sebesar 100% dan sampai akhir 2022 Asn Berkategori Baik sebesar 100% yang artinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhasil mencapai target sebesar 100%.

Sedangkan pada indicator ke 4 yaitu temuan material lhp yang ditargetkan pada akhir Rpjmd/Renstra sebesar 100% dan sampai akhir 2022 temuan material Lhp pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mencapai target sebesar 100%.

2.4.3 Analisis Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Indicator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Standar Nasional	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan pengelolaan keuangan	1. Nilai SAKIP OPD 2. Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan	Persentase	74,05 100 100		

	perangkat daerah	3. Persentase ASN Nilai SKP Kategori terbaik 4. Temuan Material Lhp yang terselesaikan		100		
--	------------------	---	--	-----	--	--

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas Realisasi kinerja sasaran ini belum bisa dibandingkan dengan standar nasional, hal ini disebabkan untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik belum ada standar nasional maupun SPM, sehingga belum dapat dibandingkan.

2.4.4 Analisa Faktor Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi

Factor pendukung yang menyebabkan keberhasilan sebagai berikut:

- Sarana dan Prasarana, Penerapan penilaian kinerja kehadiran dengan Berbasis IT (e-rkmd, e-planning, e-budgeting) serta pelaporan kinerja yang tepat waktu.
- Dukungan dari ASN Bakesbangpol untuk meningkatkan kinerja sangat baik dalam peningkatan disiplin.
- Dengan adanya sosialisasi terkait peningkatan ASN dalam menyusun SKP di Badan Kesatuan Bangsa dan politik dan melakukan kolaborasi dengan BKD.

2.4.5 Analisis Capaian Kinerja atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	%Penyerapan Anggaran	%Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100	90,12	9,88

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Keterangan :

Jika %capaian Kinerja<100% maka % capaian kinerja-%penyerapan anggaran

Jika% capaian kinerja>= 100% maka 100% - %penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel diatas Badan kesatuan bangsa dan politik mendapatkan penyerapan anggaran sebesar 90,12 % dengan capaian kinerja sebesar 100% sehingga tingkat efisiensi pada Bakesbangpol mendapatkan persentase sebesar 9,88%.

2.4.6 Analisa Program/ Kegiatan dalam pencapaian kinerja

No.	Program	Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	% keuangan	% capaian
1.	program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1. perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Rp. 9,276,955,452	Rp. 8,360,064,451	90,12	100 %

		Pemerintahan Daerah				
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.				

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai pada tabel realisasi keuangan di atas untuk mendukung sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah terdapat 1 program dan 7 kegiatan untuk mendukung tercapainya suatu target yang ingin dicapai sesuai pada table di atas kita dapat melihat persentase keuangan sebesar 90,12 dan tingkat capaian kinerja pada table diatas menunjukkan persentase capaian sebesar 100%.

2.4.7 Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indicator	Satuan	Target	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1. Nilai SAKIP OPD	Nilai	95	74,05	75,00
2. Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	Persentase	100%	100%	100%
3. Persentase ASN Nilai SKP Kategori terbaik		100%	100%	100%
4. Temuan Material Lhp		100%	100%	100%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Berdasarkan table diatas perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir badan kesatuan bangsa dan politik menunjukkan bahwa pada tahun 2021 rata-rata pencapaian diatas 74-100 % dan

realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan dengan pencapaian sebesar 75-100 % sehingga jika dibanding dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan pada nilai sakiip sebesar 0,95.

Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2019-2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel, maka pada tahun anggaran 2022 telah dialokasikan anggaran dari dana APBD Prov. Sulsel dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 65,636,019,208 dengan realisasi sebesar Rp. 63,907,517,662 (97.37%),

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut : Rincian Anggaran Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi antara lain: Belanja Pegawai, Belanja Barang jasa dan Belanja Hibah kemudian Belanja Modal terdiri dari : Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebelum dan setelah perubahan. Selanjutnya, terdapat DPPA untuk Belanja Daerah sehingga rincian anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel berubah menjadi :

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)		Bertambah/Berkurang	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
Belanja Daerah	71.621.006.231	65.636.019.208	(5.984.987.023)	(8,35)
Belanja Operasi	71.515.675.231	65.360.005.208	(6.155.670.023)	(8,60)
Belanja Modal	105.331.000	276.014.000	(170,683,000)	(61,71)

Belanja Daerah berupa belanja operasi dan belanja modal dengan alokasi satu tahun anggaran dan telah teralisasi Rp 63,907,517,662,- atau 97.37 % dari jumlah alokasi belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 65.636.019.208 Dibandingkan dengan tahun 2021 capaian realisasi keuangan sebesar 91.44 % maka tahun ini terjadi perbaikan dengan meningkatnya realisasi capaian keuangan. Pada dokumen anggaran perubahan, belanja Operasi Berkurang sebesar Rp 6.155.670.023 hal ini disebabkan penyesuaian terhadap adanya pengurangan anggaran Hibah belanja Operasi pada tahun 2022.

Realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 63,907,517,662,- atau 97.37 % dan dari anggaran tersebut memiliki sisa dana yang belum teralisasi sebesar Rp. 1,728,501,546 . Jika dibandingkan dengan tingkat capaian tahun 2021 sebesar 91.44 % dan di tahun 2022 terjadi peningkatan capaian realisasi sebesar 97.37 % pada badan kesatuan bangsa dan politik Selengkapnya realisasi keuangan dan fisik disajikan sebagai berikut;

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, indikator kinerja, target dan realisasinya

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengukur kinerja, indikator yang digunakan adalah indikator sasaran strategis dan indikator kegiatan 2021. Indikator Kinerja sasaran strategis adalah yang menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja. Indikator kinerja kegiatan terdiri dari indikator input, output dan outcome untuk setiap kegiatan. Selanjutnya setiap indikator kinerja ditetapkan satuan, rencana dan realisasinya. Dari perbandingan antara rencana dan realisasi tersebut dihasilkan capaian kinerja.

Untuk Laporan Kinerja Tahun 2021, pengukuran kinerja keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan memanfaatkan data base kinerja. Data base kinerja ini diperoleh melalui pengumpulan data kinerja 2 sumber yaitu :

1. Data internal yang diperoleh oleh masing-masing Bidang dan Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Data eksternal yang berasal dari luar lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.

• Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Hingga akhir tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan Rencana Strategis pada Tahun ke-3 yaitu tahun 2021. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

Adapun pengukuran ke 3 sasaran strategis tersebut sebagai tolok ukur keberhasilan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
-----	-------------------	-------------------	--------

1	Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat	Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik	110
2.	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Selatan	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sulsel	71,29
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	- Nilai SAKIP OPD - Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) - Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik - Nilai Temuan Material LHP (%)	90 95 100 100%

2.2.1. Sasaran meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat

2.2.1.1 Analisis capaian Kinerja Analisa Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN
Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat	Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik	110	21	523.8%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Untuk tahun 2020 target pada sasaran ini sebesar 110 Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik akan tetapi sampai dengan akhir 2021 badan kesatuan bangsa dan politik berhasil menekan sehingga hanya terjadi 21 kasus Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik dengan persentase capaian target hanya 523.8 % hasil ini didapat dari target 2021 dibagi realisasi capaian kinerja rumus ini dipakai dikarenakan metode yang ada di kesbangpol < target dinyatakan bagus.

2.2.1.2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indicator kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi 2021	Tingkat pencapaian
Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik	Kasus	420	21	2000%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas badan kesatuan bangsa dan politik berhasil meningkatkan kemandirian dan ketentraman masyarakat terbukti dengan berhasil menekan Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik (sebagai indikator). dimana target akhir rpjmd/ renstra sebesar 420 kasus berhasilkan di tekan untuk tahun ini hanya 21 kasus dengan tingkat pencapaian 2000 % hasil ini didapat dari target akhir RPJMD/RENSTRA dibagi realisasi 2021 rumus ini dipakai dikarenakan metode yang ada di kesbangpol < target dinyatakan bagus.

2.2.1.3 Analisis Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Standar nasional	Capaian
1.	Meningkatnya keamanan dan ketentraman Masyarakat	Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik	Kasus	21		-

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas Realisasi kinerja sasaran ini belum bisa dibandingkan dengan standar nasional, hal ini disebabkan untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik belum ada standar nasional maupun SPM, sehingga belum dapat dibandingkan.

2.2.1.4. Analisa Faktor Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi

factor pendukung yang menyebabkan keberhasilan sebagai berikut:

- terciptanya koordinasi yang baik dengan semua stakeholder antara lain TNI, POLRI, dan Badan Intelijen Daerah.
- Dukungan dari pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Badan Kesbangpol Kab/Kota.



Ket: kepala badan kesbangpol melakukan Rapat dengan kepala BNN terkait Ranperda P4GN



Ket : Badan kesatuan bangsa dan politik menerima kunjungan Ormas



Ket : Badan kesatuan bangsa dan politik melakukan rapat komida dengan stakeholder



Ket : Badan kesatuan bangsa dan politik menerima aspirasi dari mahasiswa



Ket : Rakornas Bakesbangpol di Sulawesi selatan yang dihadiri plt. Gubernur sulsel terkait kolaboratif , kreatif dan inovatif



Ket : Badan kesatuan bangsa dan poltik melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Bakesbangpol kab/kota

2.2.1.5. Analisis Capaian Kinerja atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

No	Sasaran	% Capaian kinerja	%Penyerapan anggaran	%Tingkat efisiensi
1.	meningkatnya keamanan dan	100 %	82.13%	17.87%

	ketentaraman masyarakat			
--	-------------------------	--	--	--

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Keterangan :

Jika %capaian Kinerja<100% maka % capaian kinerja-%penyerapan anggaran.

Jika% capaian kinerja>= 100% maka 100% - %penyerapan anggaran.

Berdasarkan table diatas Badan kesatuan bangsa dan politik mendapatkan penyerapan anggaran sebesar 82.17% dengan capaian kinerja sebesar 100 % sehingga tingkat efisiensi pada Bakesbangpol mendapatkan persentase sebesar 17.87%.

2.2.1.6. Analisa Program/ Kegiatan dalam pencapaian kinerja

No.	Program	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	% keuangan	Capaian kinerja
1.	program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Rp. 8,695,073,083	Rp. 7,722,008,721	88,81	100 %
2.	program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Rp. 168,493,630	Rp. 88,268,130	52,39	75 %
3.	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Rp. 6,986,849,456	Rp. 6,686,535,917	95,70	99.73 %
4.	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Rp. 140,728,600	Rp. 129,899,408	92,30	125%

5.	program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Rp. 1,505,441,400	Rp. 1,427,380,821	94,81	100 %
6.	program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Rp. 2,321,545,100	Rp. 2,067,332,883	89,05	100%
	Jumlah	Rp.19,818,131,269	Rp.18,121,425,880	91,44	100

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan tabel diatas ada 6 program penunjang yang meningkatkan sasaran strategis meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% Dalam mencapai target pada sasaran ini, semua program yang ada secara bersama-sama menunjang tercapainya target yang telah ditentukan. Adapun program yang paling berperan dalam pencapaian target sasaran ini adalah program peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, program pemeliharaan ketenteraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Secara keseluruhan pencapaian sasaran meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat dapat tercapai dengan baik pada tahun 2021 ini. Semua potensi konflik yang ada pada tahun 2021 dapat ditangani dengan baik melalui koordinasi dengan stakeholder terkait terutama Badan Intelijen Daerah, TNI, dan POLRI dan Masyarakat di Sulawesi Selatan.

2.2.1.7. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indicator	satuan	Target	Realisasi 2020	Realisasi 2021
-----------	--------	--------	----------------	----------------

Jumlah Konflik Sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik	Kasus	110	80	21
---	-------	-----	----	----

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Berdasarkan table diatas perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, untuk analisis ini pada badan kesatuan bangsa dan politik berhasil menekan angka kasus jumlah konflik social yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik yang satuannya kasus dan berhasil menekan sebanyak 21 kasus.

2.2.2. Sasaran strategis meningkatnya indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan

2.2.2.1. Analisis capaian Kinerja Analisa Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indicator kinerja	Target	Realisasi	% capaian
Nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan	71,79	73,43	102,28

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan table diatas tahun 2021 badan kesatuan bangsa dan politik menargetkan nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan sebesar 71,79 akan tetapi sampai dengan akhir 2021 indeks demokrasi indonesia di sulawesi selatan berdasarkan data BPS tercatat sebesar 73,43 yang artinya target tersebut tercapai sebesar 102,28.

2.2.2.2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indicator kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi 2021	Tingkat pencapaian
Nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan	Angka	71,79	73,43	102,28

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan table diatas akhir rpjmd/renstra badan kesatuan bangsa dan politik menargetkan nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan sebesar 71,79 akan tetapi sampai dengan akhir 2021 indeks demokrasi indonesia di sulawesi selatan berdasarkan data BPS tercatat sebesar 73,43 yang artinya target tersebut tercapai sebesar 102,28.

2.2.2.3. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Indicator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Standar Nasional	Capaian
1.	meningkatnya nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan	Nilai indeks demokrasi di Sulawesi selatan	Angka	73,43	73,66	99,68%

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan tabel diatas Nilai IDI di Sulawesi selatan sebesar 73,43 dibandingkan dengan IDI (Nasional) sebesar 73.66, IDI Sulawesi selatan mendapatkan capaian sebesar 99,68% itu artinya cukup baik karena di atas 90%.

2.2.2.4. Analisa Faktor Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi

Factor pendukung yang menyebabkan keberhasilan sebagai berikut:

- Terciptanya koordinasi yang baik dengan semua stakeholder terkait dengan demokrasi antara lain LSM, Partai Politik, Media Cetak, Media Elektornik
- Dukungan dari pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Badan Kesbangpol Kab/Kota



Ket : Bakesbangpol melakukan rapat dengan insan PERS dan LSM

Ket : Bakesbangpol melakukan rapat dengan seluruh Kab/kota terkait kegiatan pemetaan dan monitoring kondisi politik



Ket : kepala badan kesbangpol menghadiri kegiatan partai politik Golkar

2.2.2.5. Analisis Capaian Kinerja atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

	Sasaran	% Capaian kinerja	%Penyerapan anggaran	%Tingkat efisiensi
1.	meningkatnya nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan.	102,28%	95,70%	6,58 %

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Keterangan :

Jika %capaian Kinerja<100% maka % capaian kinerja-%penyerapan anggaran

Jika% capaian kinerja>= 100% maka 100% - %penyerapan anggaran.

Berdasarkan table diatas Badan kesatuan bangsa dan politik mendapatkan penyerapan anggaran sebesar 95,70 dengan capaian kinerja sebesar 102,28% sehingga tingkat efisiensi pada Bakesbangpol mendapatkan persentase sebesar 6,58%

2.2.2.6. Analisa Program/ Kegiatan dalam pencapaian kinerja

No.	Program	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	% keuangan	Capaian kinerja
1.	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan	Rp. 6,986,849,456	Rp. 6,686,535,917	95,70	99.74 %

melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik				
--	--	--	--	--

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Sesuai pada tabel di atas untuk mendukung sasaran pada Indeks Demokrasi Indonesia terdapat 1 program dan 4 indikator yang menunjang untuk terjadinya peningkatan IDI sesuai realisasi keuangan sebesar Rp. 6,686,535,917 atau 95.70 %, dengan tingkat capaian kinerja 99.74 % sehingga program tersebut berjalan sesuai dengan sasaran yang diinginkan untuk mencapai target.

2.2.2.7. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indicator	Satuan	Target	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Nilai indeks demokrasi di Sulawesi selatan	Angka	71.79	70.58	73,43

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir badan kesatuan bangsa dan politik menunjukkan bahwa target di atas sebesar 71,79 dengan realisasi 2020 sebesar 70,58 dan realisasi 2021sebesar 73,43 tabel ini menunjukkan terdapat peningkatan IDI di Sulawesi Selatan.

2.2.3. Sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.

2.2.3.1. Analisis capaian Kinerja Analisa Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indicator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai SAKIP OPD	90	74,05	82.27 %
Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	100 %	100 %	100%
Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik	100 %	100 %	100%

Temuan material LHP	100 %	100%	100%
---------------------	-------	------	------

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas pada tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menargetkan mendapat poin 90 untuk Nilai sakip Opd akan tetapi sampai dengan akhir 2021 hasil evaluasi inspektorat provinsi Sulawesi selatan terhadap Sakip Bakesbangpol tahun 2019 mendapat poin 74,08 ini artinya badan kesatuan bangsa politik berhasil mencapai target sebesar 82.27%.

Sedangkan untuk indikator ke 2 yaitu Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) ditargetkan tercapai sebesar 100% dan sampai dengan akhir 2021 seluruh capaian kinerja berhasil terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100%.

Sedangkan untuk indikator ke 3 yaitu Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik pada badan kesatuan bangsa dan politik yang di targetkan sebesar 100% dan sampai akhir 2021 Asn Berkategori Baik sebesar 100% yang artinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhasil mencapai target sebesar 100%, Indikator ke 4 yaitu temuan material Lhp pada badan kesatuan bangsa dan politik di targetkan sebesar 100% dan sampai akhir 2021 memperoleh target sebesar 100%.

2.2.2.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indicator kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi 2021	Tingkat pencapaian
Nilai SAKIP OPD	Nilai	100	74,05%	74,05%
Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	Persentase	100%	100 %	100 %
Persentase ASN Nilai SKP Kategori terbaik	Persentase	100%	100%	100%

Temuan material LHP	persentase	100%	100%	100%
---------------------	------------	------	------	------

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas akhir rpjmd/renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menargetkan mendapat poin 100 untuk Nilai sakip Opd akan tetapi sampai dengan akhir 2021 hasil evaluasi inspektorat provinsi Sulawesi selatan terhadap Sakip Bakesbangpol tahun 2021 mendapat poin 74,05 ini artinya badan kesatuan bangsa politik berhasil mencapai target sebesar 74,05%.

Sedangkan untuk indikator ke 2 yaitu Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) ditargetkan akhir Rpjmd/Renstra tercapai sebesar 100% dan sampai dengan akhir 2021 seluruh capaian kinerja berhasil terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100%.

Sedangkan untuk indikator ke 3 yaitu Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik pada badan kesatuan bangsa dan politik yang di targetkan akhir Rpjmd/Renstra sebesar 100% dan sampai akhir 2021 Asn Berkategori Baik sebesar 100% yang artinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhasil mencapai target sebesar 100%.

Sedangkan pada indicator ke 4 yaitu temuan material lhp yang ditargetkan pada akhir Rpjmd/Renstra sebesar 100% dan sampai akhir 2021 temuan material Lhp pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mencapai target sebesar 100%.

2.2.3.3. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Indicator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Standar Nasional	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	5. Nilai SAKIP OPD 6. Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan 7. Persentase ASN Nilai SKP Kategori terbaik 8. Temuan Material Lhp	Persentase	74,05 100 100 100		

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas Realisasi kinerja sasaran ini belum bisa dibandingkan dengan standar nasional, hal ini disebabkan untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik belum ada standar nasional maupun SPM, sehingga belum dapat dibandingkan.

2.2.3.4. Analisa Faktor Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi

Factor pendukung yang menyebabkan keberhasilan sebagai berikut:

- Sarana dan Prasarana, Penerapan penilaian kinerja kehadiran dengan Berbasis IT (e-rkbmd, e-planning, e-budgeting) serta pelaporan kinerja yang tepat waktu.
- Dukungan dari ASN Bakesbangpol untuk meningkatkan kinerja sangat baik dalam peningkatan disiplin.



Ket: kepala badan kesbangpol memberikan arahan terkait pengisian Skp 2021



Ket : Kepala badan kesatuan bangsa dan politik memberikan arahan dan motivasi kepada eselon 3 dan 4 serta staff



Ket : Kegiatan sosialisasi penilaian kinerja Asn tahun 2021



Ket : Sosialisasi Peningkatan disiplin ASN di masa pandemic covid 19

2.2.3.5. Analisis Capaian Kinerja atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik.

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	%Penyerapan Anggaran	%Tingkat Efisiensi
----	---------	-------------------	----------------------	--------------------

1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100	88,81	11,19
----	---	-----	-------	-------

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Keterangan :

Jika %capaian Kinerja<100% maka % capaian kinerja-%penyerapan anggaran

Jika% capaian kinerja>= 100% maka 100% - %penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel diatas Badan kesatuan bangsa dan politik mendapatkan penyerapan anggaran sebesar 88,81 % dengan capaian kinerja sebesar 100% sehingga tingkat efisiensi pada Bakesbangpol mendapatkan persentase sebesar 11,19%.

2.2.3.6. Analisa Program/ Kegiatan dalam pencapaian kinerja

No.	Program	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	% keuangan	% capaian
1.	program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Rp. 8,695,073,083	Rp. 7,722,008,721	88,81	100 %

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai pada tabel realisasi keuangan di atas untuk mendukung sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah terdapat 1 program untuk mendukung tercapainya suatu target yang ingin dicapai sesuai pada table di atas kita dapat melihat persentase keuangan yang rata-rata tidak mencapai target dikarenakan anggaran pada badan pengelolaan keuangan dan asset daerah tidak mencukupi untuk membayarkan kegiatan tersebut dikarenakan mengalami pengeseran anggaran selama pada masa pandemic covid 19. tapi tingkat capaian kinerja pada table diatas menunjukkan persentase capaian sebesar 100%.

2.2.3.7 Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indicator	Satuan	Target	Realisasi 2020	Realisasi 2021
5. Nilai SAKIP OPD	Nilai	90	73,38	74,05
6. Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	Persentase	100%	100%	100%
7. Persentase ASN Nilai SKP Kategori terbaik		100%	100%	100%
8. Temuan Material Lhp		100%		100%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel

Berdasarkan table diatas perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir badan kesatuan bangsa dan politik menunjukkan bahwa pada tahun 2020 rata-rata pencapaian diatas 73-100 % dan realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan dengan pencapaian sebesar 74-100 % sehingga saat ini bakesbangpol sangat tercapai jika dibanding dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan pada nilai sakip sebesar 0,67 dan pada indicator ke 4 telah terjadi penambahan indicator oleh Menpan Rb pada saat melakukan Coching Klinik sehingga pada tahun 2020 tidak terdapat realisasi sesuai table di atas, tetapi badan kesatuan bangsa dan politik mendapat cukup baik dalam hal melaksanakan seluruh capaian kinerja pada tahun ini.

Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2019-2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel, maka pada tahun anggaran 2021 telah dialokasikan anggaran dari dana APBD Prov. Sulsel dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 19,818,131,269,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18,121,425,880.0 (91.44%), Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut : Rincian Anggaran Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi antara lain: Belanja Pegawai, Belanja Barang jasa dan Belanja Hibah kemudian Belanja Modal terdiri dari : Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebelum dan setelah perubahan. Selanjutnya, terdapat DPPA untuk Belanja Daerah sehingga rincian anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel berubah menjadi

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)		Bertambah/Berkurang	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
Belanja Daerah	24.196.934.068,00	19.818.131.269,00	(4.378.802.799,00)	(18,10)
Belanja Operasi	23.671.917.268,00	19.502.900.869,0	(4.169.016.399,00)	(17,61)
Belanja Modal	525.016.800,00	315.230.400,00	(209.786.400,00)	(39,96)

Belanja Daerah berupa belanja operasi dan belanja modal dengan alokasi satu tahun anggaran dan telah teralisasi Rp18,121,425,880,- atau 91,44% dari jumlah alokasi belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 19.818.131.269,00 Dibandingkan dengan tahun 2020 capaian realisasi keuangan untuk belanja tidak langsung sebesar 98,15% maka tahun ini terjadi perbaikan dengan meningkatnya realisasi capaian keuangan belanja tidak langsung. Pada dokumen anggaran perubahan, belanja Operasi Berkurang sebesar Rp 4.378.802.799,00 hal ini disebabkan penyesuaian terhadap adanya rasionalisasi anggaran belanja Operasi pada tahun 2021.

Realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 sebesar Rp Rp18,121,425,880,- atau 91,44% dan dari anggaran tersebut memiliki sisa dana yang belum teralisasi sebesar Rp. 1,696,705,389.00. Jika dibandingkan tahun 2020 terjadi penurunan tingkat capaian realisasi keuangan, dengan tingkat capaian tahun 2020 sebesar 87,90%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Renstra 2018-2023 Bakesbangpol Prov. Sulsel menetapkan isu strategis yaitu Sulsel aman, damai dan demokratis dari beberapa pertimbangan yang di telaah seperti Aspek Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Permasalahan Strategis. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi selatan sangat besar karena berpengaruh terhadap kondisi IPOLEKSOSBUDHUKAM yang berimplikasi terhadap stabilitas daerah sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan ujung tombak dari seluruh sector pembangunan dan merupakan salah satu tiang / pilar utama untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam memelihara persatuan dan kesatuan demi tegaknya Negara Kesatuaahn Republik Indonesia, hal ini juga berdasarkan Undang – Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Melaksanakan tugas Pemerintahan Umum, absolute dan kongkuren.

Peluang yang memberi dukungan terhadap kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

1. Masih Tingginya semangat persatuan dimasyarakat untuk menjadi suatu bangsa.
2. Adanya pemahaman dan pengertian yang sama diantara elit di provinsi sulsel untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat.
3. Banyak nya lembaga independen yang mampu melakukan pengawasandan kontrol terhadap program dan pembangunan.

Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

1. Terdapatnya potensi konflik vertikal dan horizontal dari aspek IPOLEKSOSBUDHUKAM.
2. Masih tingginya angka kemiskinan dan penganguran serta instabilitas harga komoditas pangan.
3. Masih tingginya ketimpangan antar masyarakat dan antara daerah pedesaan dan perkotaan, golongan umur dan jenis kelamin.
4. Terdapatnya gejala politisasi nilai-nilai agama dan kepercayaan.
5. Tranformasi teknologi industry dan komunikasi.
6. Menguatnya sikap primordialisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan merebaknya isu putra daerah dalam pengisian jabatan-jabatan strategis dilingkungan pemerintahan daerah.
7. Masihadanya penggunaan cara- cara penyampaian pendapat yangmengabaikan / melecehkan symbol-symbol Negara, bahkan ada yang cenderung anarkis dan serta masih adanya kecenderungan lebihmementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum.
8. Melemahnya wawasan kebangsaan yang ditandai oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti nasionalisme dan wawasan kebangsaan.
9. Meningkatnya paham radikalisme ditengah masyarakat.

Setelah diadakan analisis terhadap gambaran pelayanan SKPD, memiliki sejumlah permasalahan dan hambatan yang timbul dalam rangka melaksanakan visi dan misi kepala daerah di dapat sejumlah isu – isu penting dan merupakan isu – isu strategis yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah tergambar dalam table berikut:

No	Aspek Permasalahan Pelayanan PD	Permasalahan Strategis	Telahaan Renstra	Telahaan Visi, Misi dan Program KD dan Wakil KD Terpilih	Telahaan RTRW/K LHS	Isu- isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA	1. Menguatnya sikap primordialisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan merebaknya isu putra daerah dalam pengisian jabatan-jabatan strategis dilingkungan pemerintahan daerah 2. Masih adanya penggunaan cara-cara penyampaian pendapat yang mengabaikan/ melecehkan symbol-symbol Negara, bahkan ada yang cenderung anarkis dan serta masih adanya kecenderungan lebih mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum	Kualitas Keamanan, Perdamaian dan demokrasi harus selalu berada di zona hijau	Visi : Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter Misi 4 Mewujudkan Kualitas Manusia yang kompetitif, inklusif dan Berkarakter		Sulsel aman, damai dan demokratis

		3. Melemahnya wawasan kebangsaan yang ditandai oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti nasionalisme dan wawasan kebangsaan 4. Meningkatnya paham radikalisme ditengah masyarakat				
2	Permasalahan dalam Bidang POLITIK DALAM NEGERI	1. Terdapatnya gejala politisasi nilai-nilai agama dan kepercayaan 2. Belum optimalnya organisasi sipil dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat				
3	Permasalahan dalam Bidang KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA,	1. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta instabilitas harga komoditas				

	AGAMA, DAN ORGANISASI	Pangan 2. Masih tingginya ketimpangan antar masyarakat dan antara daerah pedesaan dan perkotaan, golongan umur dan jenis kelamin Masih tingginya angka kemiskinan dan penganguran serta instabilitas harga komoditas pangan 3. Masih tingginya ketimpangan antar masyarakat dan antara daerah pedesaan dan perkotaan, golongan umur dan jenis Kelamin				
4	Permasalahan dalam Bidang KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	1. Terdapatnya potensi konflik vertical dan horizontal dari aspek IPOLEKSOSBUDHUKAM				

		2. Tranformasi teknologi industry dan komunikasi				
--	--	--	--	--	--	--

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan politik masuk dalam unsur pemerintahan umum dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung misi Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif serta misi Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter hal ini sudah sejalan dengan renstra Badan dan Kesatuan Bangsa dan Politik dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang dibebankan dengan target indikator yang selaras dengan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain. Pada Rancangan awal RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapatkan Proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebesar Rp.52.316.473.947,00,-,

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2023 tetap akan berdasarkan Permendagri 90 dimana Program dan Kegiatan sudah ditetapkan yang bisa dilakukan hanya memilih Program Kegiatan yang sudah tersedia. Jadi masyarakat hanya bisa mengusulkan Program atau Kegiatan ada di Permendagri 90 tersebut.

Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas dan tetap menerima masukan atau usulan dari masyarakat, program dan kegiatan yang diajukan walaupun tidak melalui proses penjaringan aspirasi dari stakeholder bidang kesatuan bangsa dan politik dengan pelaksanaan Forum OPD, namun koordinasi dilakukan melalui telepon dan media sosial whatsapp.

Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan proses penjaringan aspirasi dari stake holder dibidang Kesbang dengan melaksanakan Forum OPD.

B A B III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum di daerah merupakan perwakilan dari pemerintah pusat yang dibawah koordinasi ditjen politik dan pemerintahan umum kementerian dalam negeri Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan UU No. 10 tahun 2016 tentang penetapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Mengamanatkan bahwa Hari, Tanggal, dan waktu pungutan suara pemilihan umum ditetapkan dengan keputusan KPU selain itu berdasarkan pasal 434 mengamanatkan bahwa Pemerintah wajib memberikan dukungan penuh kepada penyelenggaraan, dan berdasarkan PKPU Nomor 3 tanggal 9 Juni 2022 ditetapkan penyelenggaraan Pemilihan umum, Pemilihan legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka untuk mencapai, memenuhi amanat diatas, prioritas pembangunan, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi maka dalam Renstra Bakesbangpol 2024-2026 telah ditetapkan **tujuan pembangunan** daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

Mewujudkan Sulawesi Selatan yang aman, damai dan demokratis.

Berdasarkan tujuan jangka menengah tersebut maka ditetapkan tujuan renja 2024 sama dengan yang tertuang dalam Renstra.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan baik tujuan jangka menengah maupun tujuan renja tahun 2024 maka telah ditetapkan **sasaran** yang akan dicapai pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Deteksi terhadap potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan.
2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Idiologi Pancasila, Politik dan Karakter Bangsa.

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam menyusun Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Bakesbangpol tahun 2024 merujuk pada permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventraisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Renstra Perubahan Bakesbangpol Prov. Sulsel 2024-2026, terdapat perbedaan antara permedagri 13 yang merupakan pedoman penyusunan terdahulu dibandingkan dengan permendagri 90 terutama dari segi prinsip dasar, pada permendagri 90 yang dipakai saat ini kita tidak diberi ruang untuk membuat sendiri nama program, kegiatan dan sub kegiatan tetapi hanya bisa memilih dari daftar yang sudah ada, bahkan indikator sub kegiatan juga telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventraisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain itu dalam memilih program, kegiatan dan sub kegiatan badan kesatuan bangsa dan politik memperhatikan pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, Selain itu dalam Menyusun (RENJA) OPD atau Bakesbangpol harus berpedoman pada Renstra OPD 2024 – 2026 dan RPD Provinsi dimana didalam RPD Provinsi tidak memuat visi dan misi kepala daerah tetapi hanya memuat tujuan dan sasaran RPD Provinsi dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diminta untuk mensuport Tujuan RPD “Mengoptimalkan tata Kelola penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel” dengan “Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah”.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya sesuai dengan permendagri 86 tahun 2017 seperti SDG’S, NSPK dan SPM khusus untuk badan kesatuan bangsa dan politik prov sulsel kami tidak memiliki target dari pemerinta pusat.

Berdasarkan metode diatas badan kesatuan bangsa dan politik mengajukan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan terdiri dari 6 program, 13 Kegiatan dan 54 Sub kegiatan. Sebagaimana terlampir pada Tabel. T-C.33:

Tabel. T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3	4	8	9	10	11		15	16	17
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			730.500.252.749,00					60.919.279.349,00	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			730.500.252.749,00					60.919.279.349,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			10.181.051.949,00					10.662.431.349,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah (%)	85.000							
		Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program (%)	100.000							
		Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti (%)	100.000							
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			196.419.000,00					238.076.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	24.000	196.419.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)			24		
8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			141.538.900,00					177.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.00	141.538.900,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.00	177.000.000,00	
8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			1.369.600,00					1.462.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1.369.600,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	1.462.000,00	
8.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			9.246.000,00					10.574.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.00	9.246.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.00	10.574.000,00	

8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			5.901.500,00				6.302.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		5.901.500,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.00	6.302.000,00	
8.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			4.095.000,00				4.373.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.00		4.095.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.00	4.373.000,00	
8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3.345.000,00				5.340.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	13.00		3.345.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.00	5.340.000,00	
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.923.000,00				33.025.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		30.923.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.00	33.025.000,00	
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.381.634.348,00				7.001.541.349,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	85.000		6.381.634.348,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)		87		
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.245.488.675,00				6.823.109.349,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	50		6.245.488.675,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52	6.823.109.349,00	
8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			23.136.573,00				32.068.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6		23.136.573,00	(Sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6	32.068.000,00	
8.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			64.294.800,00				11.674.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12		64.294.800,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	11.674.000,00	
8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.323.500,00				4.104.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2.323.500,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2	4.104.000,00	
8.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			1.996.800,00				2.131.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1.996.800,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	2.131.000,00	
8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			43.017.300,00				117.096.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	43.017.300,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	117.096.000,00	
8.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1.376.700,00				11.359.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1.376.700,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	11.359.000,00	
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			52.003.500,00				54.839.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Barang Milik Daerah Yang dikelola Oleh Perangkat Daerah (Barang)	4.000	52.003.500,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)		4		
8.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			31.170.000,00				33.289.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	31.170.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	33.289.000,00	
8.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			20.833.500,00				21.550.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	20.833.500,00	(sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	21.550.000,00	
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			118.413.400,00				123.259.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)	195.000	118.413.400,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)		195		
8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut			90.050.000,00				92.969.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Kelenakapannv a								

8.01.01.1.05.0003		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)</i>	58	90.050.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58	92.969.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi			26.668.600,00				28.481.000,00	
	Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	12	26.668.600,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	28.481.000,00	
8.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja			1.694.800,00				1.809.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pegawai	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)</i>	12	1.694.800,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	1.809.000,00	
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.269.691.655,00				999.898.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		<i>Jumlah Paket (Paket)</i>	26.000	43.101.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)		26		
		<i>jumlah dokumen (Dokumen)</i>	43.000	358.967.100,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)		43		
		<i>Jumlah Laporan (Laporan)</i>	41.000	867.623.555,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)		41		
8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi			23.300.000,00				43.920.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	1	23.300.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	43.920.000,00	
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			125.390.300,00				133.916.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>	2	125.390.300,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2	133.916.000,00	
8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			19.801.000,00				21.147.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)</i>	10	19.801.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.00	21.147.000,00	
8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			230.833.200,00				246.529.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	1	230.833.200,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	246.529.000,00	
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan			867.623.555,00				551.457.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	40	867.623.555,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40	551.457.000,00	

8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			2.743.600,00				2.929.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12		2.743.600,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	2.929.000,00	
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang			233.000.000,00				186.182.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Urusan Pemerintah Daerah								
	Jumlah Unit (Unit)	42.000		233.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)		42		
8.01.01.1.07.0006	Jumlah Paket (Paket)	10.000			(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)		10		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			233.000.000,00				186.182.000,00	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	30		233.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30	186.182.000,00	
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.287.976.946,00				1.194.232.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	224.000		1.287.976.946,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)		224		
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.287.976.946,00				1.194.232.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		1.287.976.946,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	1.194.232.000,00	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			641.913.100,00				864.404.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)	69.000		641.913.100,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)		69		
8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			426.090.000,00				639.246.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	26		426.090.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26	639.246.000,00	
8.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel			8.323.100,00				8.888.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.01.1.09.0006		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	8.323.100,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20	8.888.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			60.000.000,00				58.740.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	60.000.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20	58.740.000,00	
8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			147.500.000,00				157.530.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	147.500.000,00	(sulawesi selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	157.530.000,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			1.500.000.000,00				8.047.036.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase Peserta Yang Hadir Pada Pendidikan Idiologi Pancasila dan Karakter bangsa (%)	80.000						
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			1.500.000.000,00				8.047.036.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase Peserta yang hadir pada pendidikan ideologi pancasila (%)	80.000	1.313.341.600,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)		80		
		Persentase Peserta yang hadir pada pendidikan karakter bangsa (%)	80.000	186.658.400,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)		80		
8.01.02.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			20.805.700,00				215.703.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	12	20.805.700,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	215.703.000,00	
8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			120.458.700,00				6.119.533.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.02.1.01.0004		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	2.00	120.458.700,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.00	6.119.533.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			45.394.000,00				25.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	100.00	45.394.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.00	25.000.000,00	
8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			13.341.600,00				86.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	12.00	13.341.600,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.00	86.800.000,00	
8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka			1.300.000.000,00				1.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	24	1.300.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25	1.600.000.000,00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			585.639.200.800,00				7.922.757.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase terlaksananya Pendidikan Politik kepada masyarakat (%)	80.000						

8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			585.639.200.800,00				7.922.757.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase Peserta yang hadir pada pendidikan Politik kepada masyarakat (%)	75.000		585.639.200.800,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)		80		
8.01.03.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			6.500.000,00				5.881.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2		6.500.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2	5.881.000,00	
8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			118.900.000,00				111.251.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2		118.900.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	111.251.000,00	
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			585.206.200.800,00				7.710.193.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.03.1.01.0004		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	100	585.206.200.800,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100	7.710.193.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			139.600.000,00				30.255.000,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	6	139.600.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6	30.255.000,00	
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			168.000.000,00				65.177.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	3	168.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	65.177.000,00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			1.200.000.000,00				113.604.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi dengan Instansi Terkait di bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Masyarakat dan Orkemas (%)	100.000						

8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			1.200.000.000,00					113.604.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dibidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Kali)	50.000		1.188.229.500,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)			50		
	Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan (Kali)	50.000		11.770.500,00	(SULAWESI SELATAN)			50		
8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			11.770.500,00					34.651.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	4		11.770.500,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4	34.651.000,00	
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			1.112.452.100,00					32.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	100		1.112.452.100,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	32.600.000,00	
8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			33.705.000,00					25.169.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	100		33.705.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	25.169.000,00	
8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			42.072.400,00					21.184.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	1	42.072.400,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	21.184.000,00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			2.150.000.000,00				1.471.998.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		persentase terlaksananya koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dan organisasi bentukan pemerintah di bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya (%)	100.000						
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			2.150.000.000,00				1.471.998.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait di bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya (Kali)	2.000	2.141.491.200,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)		2		
		Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan Organisasi bentukan pemerintah di bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya (Kali)	2.000	8.508.800,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)		2		
8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			8.508.800,00				61.990.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	3	8.508.800,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	61.990.000,00	
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			2.054.383.600,00				1.320.145.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.05.1.01.0004		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)</i>	100	2.054.383.600,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100	1.320.145.000,00	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			63.544.000,00				50.339.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.1.01.0005		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)</i>	100	63.544.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100	50.339.000,00	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			23.563.600,00				39.524.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			129.830.000.000,00				32.701.453.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		<i>Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi Dengan Tim Bentukun Pemerintah di bidang Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Forkopimda (%)</i>	100.000						
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			129.830.000.000,00				32.701.453.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		<i>Jumlah kordinasi dan sinergi dengan forkopimda (Kali)</i>	12.000	680.588.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)		12		

8.01.06.1.01.0001		Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan tim bentukan pemerintah di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (Kali)	6.000	129.149.412.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)		6		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			128.675.602.700,00				28.973.287.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	6	128.675.602.700,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6	28.973.287.000,00	
8.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			22.089.350,00				1.124.578.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2	22.089.350,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2	1.124.578.000,00	
8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			151.119.000,00				538.359.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.06.1.01.0005		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	30	151.119.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30	538.359.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			300.600.950,00				424.053.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	12	300.600.950,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	424.053.000,00	
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi			680.588.000,00				1.641.176.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)	1	680.588.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	1.641.176.000,00	
J U M L A H				730.500.252.749,00				60.919.279.349,00	

B A B IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel Rancangan Akhir Renja sebagaimana terlampir.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan menyediakan berbagai kebutuhan Barang dan Jasa kantor termasuk barang modal/asset serta dukungan administrasi perjalanan dinas, program ini memiliki 3 indikator yaitu Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah (%), Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program (%), Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti (%). Terdapat 8 kegiatan dan 31 sub kegiatan yang anggarannya direncanakan akan didanai oleh APBD Prov. Sulsel sebesar Rp. 10.181.051.949,00,- dengan rincian Sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - A. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - B. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - C. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - D. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - E. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - F. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - G. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - A. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - B. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - C. Sub kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
 - D. Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - E. Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - F. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- G. Sub kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - A. Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - B. Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - A. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - B. Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - C. Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - A. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - B. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - C. Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - D. Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - E. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - F. Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - A. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - B. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - C. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - A. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - B. Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - C. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - D. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan memiliki 1 indikator yaitu: Persentase Peserta Yang Hadir Pada Pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter bangsa. Dalam program ini terdapat 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang anggarannya direncanakan akan didanai oleh APBD Prov. Sulsel sebesar Rp.1.500.000.000,00- sebagai berikut :
- 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

- A. Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - B. Sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - C. Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - D. Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - E. Sub kegiatan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.
- III. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, pada program ini memiliki 1 indikator yaitu Persentase terlaksananya Pendidikan Politik kepada masyarakat dan terdapat 1 kegiatan dan 5 Sub kegiatan, yang anggarannya direncanakan akan didanai oleh APBD Prov. Sulsel sebesar Rp.585.639.200.800,00,- dengan rincian sebagai berikut:
- 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dan terdiri dari sub kegiatan yaitu:
 - A. sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - B. sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - C. sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

- Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- D. sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - E. sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- IV. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan 1 indikator yaitu : Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi dengan Instansi Terkait dibidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Masyarakat dan Orkemas, program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang anggarannya direncanakan akan didanai oleh APBD Prov. Sulsel sebesar Rp.1.200.000.000,00,- dengan rincian sebagai berikut :
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :
 - A. Sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - B. Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - C. Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - D. Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- V. Program Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, program ini memiliki 1 indikator yaitu % persentase terlaksananya koordinasi dan sinergi

dengan instansi terkait dan organisasi bentukan pemerintah di bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang anggarannya direncanakan akan didanai oleh APBD Prov. Sulsel sebesar Rp. 2.150.000.000,00,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
 - A. Sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - B. Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - C. Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - D. Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

VI. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan 1 indikator Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi Dengan Tim Bentukan Pemerintah di bidang Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dan Forkopimda. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan, yang anggarannya direncanakan akan didanai oleh APBD Prov. Sulsel sebesar Rp. 129.830.000.000,00,-dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dan terdiri dari beberapa sub kegiatan yang meliputi:
 - A. Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah,
 - B. Sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga

Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah,

- C. Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah,
- D. Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah,
- E. Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah,
- F. Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

BAB V PENUTUP

5.1

Catatan Penting

Dalam Rencana kerja Bakesbangpol pada tahun 2024 ini pendanaan yang tertera diatas masih pagu indikatif, sehingga pencapaian indikatornya pun sesuai dengan pagu tersebut, apabila pagu indikatifnya tidak sama apalagi dibawahnya ada kemungkinan pencapaian indikator akan menurun.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pada renja Bakesbangpol tahun 2024 khususnya dari segi pendanaan bisa terpenuhi 100% sesuai pagu indikatif, diharapkan bisa memenuhi seluruh target indikator yang ada, apabila tidak, kemungkinan pencapaian target indikator juga mengalami penurunan.

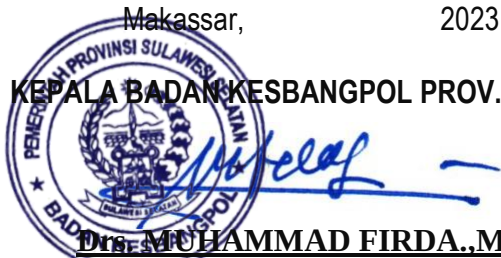
5.3 Rencana Tindak Lanjut

Bakesbangpol akan berkoordinasi dengan Bappelitbangda dan BPKAD untuk rencana pendanaan.

Makassar,

2023

KEPALA BADAN KESBANGPOL PROV. SULSEL



Drs. MUHAMMAD FIRDA.,M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19631231 198803 1 132